

Pelebagaan Partai Politik

(Studi Kasus: Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Di Kota Surabaya Tahun 2009)

Arya Wiraraja M*

ABSTRAKSI

Partai politik memainkan sejumlah peran dalam demokrasi, diantaranya sebagai sarana pendidikan politik. Partai yang besar selalu identik dengan jumlah kader atau anggota yang banyak pula. Kader atau anggota merupakan basis sebuah partai. Semakin banyak anggota semakin kuat partainya. Sebagai salah satu instrumen pengkaderan, Pendidikan dan pelatihan anggota hari ini sangat penting untuk pengembangan partai, karena Anggota baru diberikan introduksi mengenai ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai. Disamping itu partai juga menyiapkan dan mendidik pimpinan - pimpinan partai selanjutnya agar dapat mengelola partai dengan baik, dan yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk menyiapkan calon kepala daerah maupun legislatif agar dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Fenomena belakangan ini partai politik cenderung lebih merekrut orang – orang diluar partai untuk di calonkan menjadi kepala daerah dan calon legislatif. Fenomena ini menjadi tanda ada permasalahan yang sangat mendasar di dalam partai Demokrat yakni dalam hal pengkaderan, padahal partai Demokrat sudah mentasbihkan dirinya adalah Partai Kader. Langkah yang di ambil Partai Demokrat menjadi bumerang, banyaknya kader partai yang masuk hanya memikirkan kepentingan pragmatis semata sehingga lupa dengan tugas-tugasnya untuk membesarkan partai dan bertanggung jawab pada bangsa dan negara, hal ini terbukti dengan banyaknya kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi.

Pelebagaan adalah proses organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil. Tingkat pelebagaan Partai Politik dapat diukur dari bagaimana partai tersebut tidak tergantung oleh ketokohan yang ada dalam Partai. Tingginya Pelebagaan sebuah Partai Politik ditandai oleh Partai Tersebut bisa mandiri dan bergerak, dengan kata lain hari ini Partai Demokrat belum menunjukkan tingkat Pelebagaan Partai yang tinggi karena Partai Demokrat masih tergantung kepada sosok Susilo Bambang Yudhoyono.

Keyword : Partai Politik, Pelebagaan Partai Politik, Rekrutmen

ABSTRAKSI

Political parties play a role in a democracy, such as a means of political education. Large parties are always identical with the number of volunteers or members that much anyway. Volunteers or members is the basis of a party. The more members the stronger party. As one of the instruments of regeneration, education and training of the day is very important for the development of the party, since the introduction of the new members are given ideology, vision and mission, program and party ideas. Besides, the party also prepare and educate leaders - hereinafter party leadership to manage the party well, and the last is the education and training aims to prepare candidates for local and legislative head in order to do a good job.

Recent phenomenon of political parties tend to recruit people - people outside the party nominated to be the head area and candidates. This phenomenon is a sign there is a very fundamental problem in the Democratic party in the regeneration, when the Democrats had consecrate himself is party cadres. Steps taken Democrats backfired, many party cadres who went in just thinking purely pragmatic interests so forgotten their duties to make the party and is responsible to the nation and the state, this is evidenced by the many volunteers involved in the Democratic Party corruption.

Institutionalization is the process of organization and procedure of obtaining the raw value and stable. The level of institutionalization of political parties can be measured by how the party does not depend on who is in the party persona. The high Institutionalization a political party can be characterized by independent and party Such moves, in other words, today's Democratic Party has not demonstrated a high level of institutionalization because the Democrats are still dependent on the figure of Susilo Bambang Yudhoyono.

Keyword : Political Parties, Political Party Institutionalization, Recruitment

** Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, email: aryamaliza@yahoo.com*

I. PENDAHULUAN

I.I.Latar Belakang

Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Partai yang kurang lebih sepuluh tahun terakhir setelah kemunculannya menjadi partai pemenang pemilu dan partai yang berkuasa di Indonesia dalam satu dekade belakangan. Di pemilu legislatif Partai ini meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR1.. Melihat perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Kenyataan tersebut memasukkan nama partai demokrat sebagai salah satu partai besar dan diperhitungkan yang ada di Indonesia. Setelah itu pada pemilu tahun 2009 Partai Demokrat menjadi pemenang, baik pemilu legislatif maupun pemilu preseiden, dengan kembali menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI yang ke 5 untuk periode ke dua.

Dari hasil Pemilu legislatif 2009 Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%)². Dari hasil tersebut Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi. boleh di bilang partai ini merupakan partai yang sakti. Ungkapan demikian agaknya pantas di berikan, jika mengingat partai ini dalam waktu singkat dapat menjadi pemenang pemilu presiden di lima tahun pertama kemunculannya dan berhasil mempertahankan salah satu pendirinya untuk di menjadi presiden selama dua periode berturut-turut. Prestasi partai demokrat ini bukan hanya di raih di tingkat Nasional tetapi prestasi tersebut di ikuti dengan kemenangan di berbagai daerah tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Baik itu pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif yang ada di tingkatan Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Di kota Surabaya sendiri partai Demokrat memperoleh hasil suara yang signifikan, Apabila pada Pemilu tahun 2004 hanya memperoleh 5 (lima) kursi di DPRD kota Surabaya, maka pada Pemilu 2009 berhasil memperoleh 16 (enam belas) kursi. Terbagi menjadi 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil). Berdasar hasil final rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.

Belakangan Prestasi partai demokrat tidak di imbangi dengan kredibilitas Partai yang semakin menurun. Kepercayaan rakyat indonesia kepada partai serta pemerintah yang di usung oleh partai Demokrat semakin menurun. Salah satu penyebab permasalahan ini dikarenakan tidak sedikit dari kader partai demokrat baik itu di tingkat nasional

maupun di daerah yang akhir-akhir ini di beritakan ikut terlibat dalam berbagai kasus hukum dan korupsi. Contohnya nyata kasus korupsi mantan bendahara umum partai Demokrat yang belakangan marak diberitakan dimedia. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang kongkrit dalam partai. Boleh dibbilang kader partai sedikit banyak memberi pengaruh didalam tubuh partai. Ketika kader tersebut tersangkut kasus hukum atau kasus korupsi maka nama baik partailah yang menjadi taruhan disini. Karena di anggap partai gagal atau tidak mampu mencetak atau mengkader kader - kadernya dengan baik. Terlebih lagi partai demokrat mengangkat isu – isu anti korupsi dalam berbagai kampanyenya. Permasalahan ini layak nya perlu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, di samping kita melihat dari dalam sistem pengkaderan yang ada di dalam partai kita juga kembalikan lagi kepada kader-kader partai tersebut. Bisa jadi kader-kader tersebut memiliki cacatan atau jejak rekam yg hitam artinya kader tersebut sebelumnya pernah terlibat kasus korupsi dan memiliki kredibilitas buruk, kader kutu lompat dalam artian kader yang mencari kenyamanan dan keamanan politis dengan berpindah-pindah partai dan kader tersebut pindah ke partai Demokrat yang notabene saat ini partai tersebut menjadi partai yang berkuasa. Perlu kita cermati ada juga kader yang masuk ke dalam partai memang memiliki tujuan, kredibilitas dan kemampuan yang bagus, namun setelah dia masuk dalam partai, kader tersebut berubah dan menjadi kader yang hitam. dalam artian kader tersebut berubah menjadi kader yang buruk karena keadaan yang ada di dalam partai.

I.II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perekrutan calon legislatif partai Demokrat di Kota Surabaya ?
2. apakah pola rekrutmen calon legislatif DPC partai demokrat kota Surabaya sudah menggambarkan pelembagaan partai yang baik ?
3. Adakah kendala yang dihadapi oleh partai Demokrat dalam merekrut calon legislatif di Kota Surabaya ?

I.III. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan bagaimana Pola perekrutan calon legislatif Partai Demokrat yang ada di Kota Surabaya.

2. Dapat menjelaskan pola rekrutmen calon legislatif DPC partai demokrat kota Surabaya sudah menggambarkan pelembagaan partai yang baik ataukah tidak.
3. Menjelaskan pengaruh Pola perekrutan calon legislatif Partai Demokrat di Kota Surabaya dapat mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat yang meningkat pada pemilu legislatif 2009 Kota Surabaya.

I.IV Manfaat

1. Sebagai syarat formal untuk meraih gelar sarjana Ilmu Politik.
2. Secara pribadi, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam penulisan karya ilmiah.
3. Secara umum, penulis mengharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran tentang topik yang penulis diteliti, terutama di dalam bidang Ilmu Politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.I Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu acuan dalam satu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi sekarang ini sepertinya partai politik merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik. Partai politik merupakan salah satu manifestasi dari sebuah adanya kebebasan yang diberikan oleh Negara yaitu kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.

Definisi partai politik menurut Ramlan Surbakti adalah suatu kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan tentang kemunculan partai politik menurut Joseph Lapalombara dan Myron Weiner. Pertama, teori kelembagaan. Teori itu menyatakan bahwa munculnya partai politik karena dibentuk oleh kalangan legislatif untuk mengadakan kontak dengan masyarakat. Kedua, teori situasi historis

yang menyatakan bahwa adanya partai politik sebagai jawaban untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh perubahan masyarakat secara luas berupa krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi seiring dengan modernisasi di Eropa. Ketiga, teori pembangunan yang mengungkapkan bahwa kelahiran partai politik merupakan hasil produk modernisasi sosial ekonomi yang mana memunculkan kelompok-kelompok sosial baru dan membutuhkan tempat untuk menyalurkan kepentingan - kepentingannya.

II.II Pelembagaan partai politik

Pelembagaan adalah proses organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil. Tingkat pelembagaan sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas dan otonomi dan keterpaduannya. Apabila ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasi dan kemudian diukur, maka sistem politik dapat juga dibandingkan satu sama lain berdasarkan tingkat kelembagaannya. Selain itu terbuka juga kemungkinan untuk mengukur peningkatan dan surutnya pelembagaan organisasi dan tatacara tertentu dalam sistem politik³.

II.III Rekrutmen partai politik

Anggota merupakan basis sebuah partai. Semakin banyak anggota semakin kuat partainya. Semakin banyak yang aktif anggota partai dan semakin banyak yang bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk partai, maka semakin kuatlah partai tersebut. Melihat kenyataan diatas, maka partai harus berusaha untuk merekrut sebanyak mungkin anggota, selama mereka setuju dengan ideologi dan nilai-nilai dasarnya. Dan setelah itu, juga menjaga agar yang sudah menjadi anggota tetap puas sebagai anggota partai.

Pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda: partai kader (atau partai pemilih) dan partai anggota (atau massa). Partai kader tidak memiliki terlalu banyak anggota. Biasanya hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa. Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Seleksi kandidat

1 KPU Kota Surabaya, Hasil rekapitulasi Suara pemilu 2009.

2 Hasil Perhitungan Pemilu legislatif 2009, diakses dari *Google.com* _____. <http://www.kpu.go.id/ver2/> .

3 .alcott parson, dengan judul *Essay in Sociological Theory* hal. 143. 239.

biasanya melalui *primaries* (pemilu pendahuluan) yang sering melibatkan publik. Karena jumlah anggota kecil partai kader membutuhkan penggunaan media (dengan biaya tinggi) untuk komunikasi dengan pemilih. Partai Republik dan Partai Demokrat di AS adalah contoh partai kader.

Partai anggota membutuhkan struktur dan organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal sampai nasional) dan kuat dibanding partai kader. Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada partai lebih kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibanding partai kader dan bersifat *bottom-up*. Tingginya jumlah anggota dan aktifis merupakan suatu kelebihan partai anggota. Anggota adalah suatu sumber daya yang penting. Mereka membayar iuran, dapat dimobilisir pada masa kampanye secara gratis dan sukarelawan dan selalu berinteraksi dengan masyarakat dan mempromosikan program partainya. Oleh karenanya, politisi berasal dari partai anggota lebih dekat dengan pemilihnya. Partai-partai besar di Eropa pada umumnya merupakan partai anggota.

II.IV Kader

Pengertian kader menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: orang yang di harapkan atau di persiapkan untuk memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai atau ssebagainya. Pengertian kader menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer adalah⁴ :

1. Kader adalah orang yang dicalonkan untuk memegang pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai, perusahaan dan sebagainya.
2. Kader adalah orang yang diharapkan memangu jabatan yang penting dikemudian hari.

II.V Fungsi Partai Politik

Berdasarkan fungsinya, partai politik memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, sebagai sarana komunikasi politik. Masyarakat memiliki bermacam-macam aspirasi, mereka membutuhkan medium untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, selain menyampaikan, mereka memiliki kepentingan agar apa yang mereka inginkan bisa terwujud. Dengan demikian, maka partai politik berperan untuk menyerap aspirasi tersebut, untuk selanjutnya dibuat sebuah rumusan kepentingan. Dengan demikian, sistem komunikasi politik

dengan konstituen bisa mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkannya dalam sebuah kebijakan.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*).

Ketiga sebagai sarana rekrutmen politik. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis.

III. METODE PENELITIAN

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen calon legislatif DPC partai demokrat kota Surabaya sudah menggambarkan pelembagaan partai yang baik ataukah tidak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya³⁹. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang

⁴ Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English, 2002

diteliti.

IV. PEMBAHASAN

IV.I. POLA REKRUTMEN BAKAL CALON LEGISLATIF PARTAI DEMOKRAT KOTA SURABAYA

Partai Demokrat terbilang partai yang masih muda, partai yang baru terbentuk pada tahun 2001 ini baru mengikuti dua kali pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, namun partai ini secara mengejutkan selama berturut-turut memenangkan pemilu. Pada tahun 2004 Demokrat berhasil memenangkan pemilu presiden dan menjadikan salah satu pendirinya menjadi presiden RI ke 6. begitu juga pada pemilu tahun 2009, Partai Demokrat menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden ke 6 RI untuk periode kedua. Tidak dapat dipungkiri lagi. Sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI dan Dewan Pembina Partai Demokrat berperan besar dalam kelangsungan partai Demokrat. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh para calon legislatif partai sebagai umpan kepada masyarakat untuk meraih dukungan sebanyak-banyak di dapil mereka masing-masing dalam Pemilu legislatif 2009.

Memang fenomena yang terjadi belakangan ini partai politik cenderung lebih merekrut orang – orang diluar partai untuk di calonkan untuk menjadi kepala daerah maupun calon legislatif. Fenomena ini menjadi pertanda terdapat permasalahan yang sangat mendasar di dalam partai Demokrat khususnya untuk hal pengkaderan. Partai yang berdiri 11 tahun dan baru mengikuti pemilu presiden – legislatif ditingkat nasional sebanyak 2 kali ini terbilang minim pengalaman.

Tidak bisa dipungkiri lagi strategi partai demokrat untuk merekrut kader dari element tokoh masyarakat dan kader partai lain memunculkan dinamika atau banyaknya kader partai yang pragmatis, kader-kader partai tersebut hanya mementingkan diri sendiri dan bukan membesarkan partai demokrat. Dekokrat di DPRD Surabaya. Memang tidak bisa dipungkiri strategi partai Demokrat tersebut bisa menjadi bumerang bagi partai Demokrat contohnya di tingkat nasional, banyaknya kader kutu loncat mengakibatkan goyahnya partai, terbukti banyaknya kader partai yang terlibat korupsi, namun di lingkungan kota Surabaya sendiri kader partai yang terbilang rekrutan lintas partai dan kader-kader baru tersebut masih konsisten dengan

partai Demokra, hal ini ditunjukkan dengan keaktifan dan dapat menjalankan program-program didalam partai maupun di institusi serta konstituen yang memilihnya.

IV.II PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRAT KOTA SURABAYA

Pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda: partai kader (atau partai pemilih) dan partai anggota (atau massa). Partai kader tidak memiliki terlalu banyak anggota. Biasanya hanya pengurus atau kandidat direkrut oleh partai, bukan anggota biasa. Tingkat organisasi partai kader kurang tinggi. Partai ini lebih mementingkan sukses di pemilu, maka disebut partai pemilih. Jumlah pemilih dibanding jumlah anggota sangat tinggi, akan tetapi pada umumnya keterikatan pemilih pada partai tidak terlalu kuat. Seleksi kandidat biasanya melalui *primaries* (pemilu pendahuluan) yang sering melibatkan publik. Partai anggota membutuhkan struktur dan organisasi yang lebih lengkap (dari tingkat lokal sampai nasional) dan kuat dibanding partai kader. Jumlah anggota tinggi dan keterikatan pada partai lebih kuat dan mendalam. Keterlibatan anggota dalam partai (seleksi kandidat, formulasi kebijakan) lebih tinggi dibanding partai kader dan bersifat *bottom-up*. Tingginya jumlah anggota dan aktifis merupakan suatu kelebihan partai anggota. Anggota adalah suatu sumber daya yang penting. Mereka membayar iuran, dapat dimobilisir pada masa kampanye secara gratis dan sukarelawan dan selalu berinteraksi dengan masyarakat dan mempromosikan program partainya. Oleh karenanya, politisi berasal dari partai anggota lebih dekat dengan pemilihnya.

Merujuk pada dua jenis partai diatas maka partai Demokrat masuk pada partai yang pertama yakni partai kader. Secara garis besar partai Demokrat merupakan partai kader seperti yang didengung-dengungkan belakangan ini. Salah satu Indikator nyatanya adalah Susilo Bambang yudhoyono membutuhkan media untuk berkomunikasi dan mensosialisasikan program-programnya yang sudah terlaksana sehingga konstituennya mengetahui bagaimana program pemerintah yang di usung partai Demokrat telah berjalan salah satunya yakni pemberantasan korupsi.

Menurut Samuel P Huntington Pelembagaan adalah proses organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil⁵. Tingkat pelembagaan sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas dan otonomi dan

keterpaduannya. Apabila ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasi dan kemudian diukur, maka sistem politik dapat juga dibandingkan satu sama lain berdasarkan tingkat kelembagaannya. Selain itu terbuka juga kemungkinan untuk mengukur peningkatan dan surutnya pelembagaan organisasi dan tatacara tertentu dalam sistem politik. Huntington menambahkan, terkadang orang awam hanya melihat tingkat pelembagaan partai yang bagus berindikator pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik sehingga melupakan bahwa rutinitas partai tersebut hanya salah satu indikator jika partai tersebut telah melembaga

Semakin mudah organisasi atau tatacara dalam menyesuaikan diri, semakin tinggi pula kelembagaannya; sebaliknya apabila kurang menyesuaikan diri dan lebih kaku, kelembagaannya akan semakin rendah pula. Kemampuan menyesuaikan diri merupakan ciri khas yang harus dicapai, namun perlu digaris bawahi lagi jika pelembagaan juga berkaitan dengan rutinitas partai, sistematis dan aturan (*rule*) yang dimiliki partai secara kuat harus ditegakkan.

Hari ini kondisi partai demokrat memang partai yang besar namun bisa dibilang partai demokrat masih belum melembaga dengan baik, indikator pertamanya yakni adanya sistem pengkaderan yang tertata dan berjenjang dari tingkatan nasional hingga tingkatan kabupaten dan kota.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

VI KESIMPULAN

Pada pemilu 2009 Partai Demokrat terbantu dengan figur SBY. Kinerja pemerintahan SBY, dinilai oleh sebagian masyarakat benar-benar mencerminkan perjuangan untuk rakyat. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya kemajuan yang dihasilkan pemerintah SBY pada periode 2004-2009, Contohnya pemberantasan korupsi, hal ini terbukti ketika SBY tidak segan-segan dan tidak membela besan beliau yakni Aulia Pohan yang telah terbukti melakukan korupsi.

Strategi politik yang digunakan partai Demokrat untuk memenangkan partai dalam Pemilu legislatif 2009 di kota Surabaya dimana partai Demokrat merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh agar mendongkrak perolehan suara partai, disamping itu juga partai

Demokrat juga merekrut calon legislatif dari kader partai lain.

Partai Demokrat telah berhasil, mendapatkan 16 kursi dari 60 calon legislatif yang ikut pemilihan legislatif 2009. partai Demokrat mendapatkan 16 kursi di DPRD kota Surabaya dengan prosentase 31.30% dari keseluruhan suara yang diperebutkan di kota Surabaya⁶. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi partai Demokrat kota Surabaya. Kesuksesan Partai Demokrat mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua ini sudah menjadi suatu indikator bahwa Partai Demokrat telah diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Kedepan partai demokrat harus merapikan sistem pengkaderannya baik itu ditingkat nasional daerah maupun ditingkatan kabupaten/kota.

Salah satu indikator tingkat pelembagaan partai tersebut tinggi atau tidak diukur dari bagaimana peran partai dapat mewadahi kader-kadernya, berjalannya roda organisasi partai dan partai politik tidak tergantung pada ketokohan salah seorang yang ada dalam partai tersebut, hal lainnya yakni partai Demokrat hanyaterjebak dalam rutinitasnya sebagai partai politik, dalam artian partai hanya menjadi semacam penyelenggara *event* (*EO*) sehingga lupa akan fungsinya yang sebenarnya yakni *Pertama*, sebagai sarana komunikasi politik, *Kedua*, sebagai sarana sosialisasi politik, *Ketiga* sebagai sarana rekrutmen politik, disamping partai dapat menjalankan ketiga fungsinya partai juga memiliki pola kesisteman yang kuat sehingga tidak terpatok pada satu tokoh semata. hal inilah yang belum ditunjukkan partai Demokrat saat ini.

Khususnya di kota Surabaya, partai Demokrat memang memenangkan pemilu legislatif, hanya saja partai Demokrat memanfaatkan popularitas SBY dan sebagai partai pemenang pemilu sebelumnya (pemilu 2004), partai Demokrat masih merekrut kader-kader dari partai lain untuk dijadikan calon legislatifnya, memang disatu sisi demokrat menunjukkan tingkat kelembagaan yang telah matang, namun disatu sisi bisa menjadi bumerang bagi keberlangsungan partai kedepan.

VII SARAN

Tolak ukur yang tepat dalam mengkaji tingginya tingkat pelembagaan organisasi bukanlah dari sudut sejauh mana organisasi

⁵ Samuel Huntington, *Tertib Politik*, 2003.

tersebut dapat melaksanakan fungsi tertentu, melainkan justru sejauh mana ia dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan fungsi. Partai politik yang sudah melembaga dengan baik adalah partai politik yang tidak tergantung pada ketokohan salah satu anggota dan kadernya.

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan "*checks and balances*". Partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Namun dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Kesempatan untuk berhasil dalam setiap perjuangan kepentingan sangat banyak tergantung kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Tingkat kebersamaan itu terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan

Organisasi yang berkembang dan makin melembaga cenderung pula mengalami proses "*depersonalisasi*". Orang dalam maupun orang luar sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampur-adukkannya dengan persoalan personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. Banyak organisasi, meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak terbangun suatu tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan

dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam hal demikian, berarti derajat pelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi, masih belum kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat.

Untuk kedepan partai Demokrat bisa lebih berbenah lagi karena jika terus menerus partai tidak menyeleksi kadernya yang masuk ke partai hal ini akan menjadi bumerang ketika nanti partai demokrat dihadapkan pada pemilu 2014. Partai yang pelembagaan nya kurang baik rentan sekali terpecah-pecah, maka dari itu jika partai Demokrat tidak dapat berbenah diri dalam kurun waktu 2 tahun ini maka partai demokrat akan kehilangan kepercayaan konstituennya di pemilu president dan pemilu legislatif 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya
- Kantaprawira Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo
- Philip selzmick, 1957. *Leadership in administrasion*. New York, Harper and Row.
- Umichulsum, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kashiko Press.
- Salim Peter, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English.
- Bahri Zainul, 1996 *Kamus Umum, Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Angkasa Bandung.
- Gaffar, Afan, Mei, 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar Indonesia.
- Parson Talcott, *Essay in Sociological Theory*
- Hutington, Samuel, Januari 2003. *Tertib Politik*, Rajawali Pers.
- Yves Meny and Andrew Knapp, 1998. *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, *Oxford University Press*,
- Milles and Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press. Jakarta.

REFERENSI LAIN (SURAT KABAR, MAJALAH,

⁶ KPU Kota Surabaya, Hasil rekapitulasi Suara pemilu 2009.

SITUS INTERNET)

Harian Jawapos, Jakarta, Juli 2011

KPU Kota Surabaya, Hasil rekapitulasi Suara pemilu
2009

WEBSITE

_____. <http://www.surabaya.go.id/ver2/profilkota/index.php?id=21> Profil Geografi Pemerintah Kota Surabaya

_____. <http://surabaya.go.id/dispending> Jumlah Penduduk kota Surabaya, diakses dari Website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

_____. [http://www.surabaya.go.id/ver2/](http://www.surabaya.go.id/ver2/Visi) Visi Misi kota Surabaya, diakses dari *Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya*

SKRIPSI DAN JURNAL

Nova, Wahyuningtyas. Upaya partai Politik dalam menjaring dukungan massa (Studi kasus Strategi Politik Partai Demokrat dalam pemilu Legislatif 2009).